

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

Konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk menyingkirkan atau mengalahkan salah satu pihak. Konflik berasal dari kata kerja *configure* yang berarti saling memukul. Manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi dengan manusia lain tidak luput dari yang namanya konflik. Yadiman dan Amelza, (2013:3) mendefinisikan bahwa konflik sebagai suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang saling bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan itu. Sedangkan Irwandi dan Endah (2017 : 24) mendefinisikan konflik sebagai gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun kelompok.

Salah satu tokoh yang menjelaskan tentang teori konflik dan digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. Dahrendorf lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1929 di Hamburg, Jerman. Waktu muda Dahrendorf pernah dikirim ke *kamp* Nazi karena terlibat dalam aktivitas politik dan pernah menjadi anggota komunitas Eropa yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Dahrendorf menolak konsep fungsionalisme yang menekankan adanya keseimbangan yang diciptakan dalam sistem sosial. Menurut Dahrendorf (Susan, 2009:49) Wajah masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi akan tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan.

Konflik pasti terjadi dan tidak dapat dihindari di masyarakat. Konflik dapat terjadi karena adanya perlawanan dan perbedaan kepentingan yang dilakukan oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain. Menurut Ikrom

(2011:273) konflik sosial biasanya disebabkan sikap *status-quo* dari pihak *super-ordinate*, dan sikap pro perubahan dari pihak *sub-ordinate*. Selain itu Dahrendorf juga berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan *latent*, kelompok kepentingan dan kelompok semu, wewenang dan posisi merupakan unsur-unsur dasar untuk menerangkan bentuk konflik (Achmad, 2014:212).

Konflik yang terjadi dalam pembagian BLT-Dana Desa yang terjadi di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus merupakan salah satu konflik yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat bukan penerima bantuan. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan inilah yang termasuk kedalam *sub-ordinate* atau kelompok pertentangan yang menjadi wajah lain dari sebuah konsensus struktural. Kepentingan untuk mendapatkan bantuan dari BLT-Dana Desa menjadi pemicu kelompok *sub-ordinate* untuk berkonflik dan melakukan pertentangan dengan pihak pemerintah desa yang termasuk kedalam kelompok *super-ordinate* karena pemerintah desa yang memegang kendali dan kekuasaan dalam program pembagian BLT-Dana Desa ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dahrendorf (dalam Ikrom, 2011: 273-274) yang menyatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul, kelompok tersebut akan melakukan tindakan yang mengakibatkan perubahan dalam struktur sosial. Dimana kemunculan kelompok konflik ini disebabkan oleh adanya ketimpangan antara kelompok *super-ordinate* dan kelompok *sub-ordinate*.

Teori konflik dialektika yang dikemukakan oleh Dahrendorf dalam mengkaji konflik yang terjadi di Desa Air Kuang memiliki hubungan erat antara kekuasaan dan wewenang dari setiap kelompok. Menurut Susan (2009:52) Dahrendorf menyebutkan bahwa teori konflik dialektika menjelaskan tentang proses terus-menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dalam struktur dan sistem sosial.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menentukan siapa saja yang memperoleh bantuan telah membentuk hubungan struktural

antara pemerintah desa dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Masyarakat yang tidak menerima bantuan akan memberikan perlawanan ketika ketetapan yang diberikan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan kepentingan yang mereka inginkan. Sehingga setiap kelompok akan berusaha untuk memperebutkan kekuasaan demi mencapai kepentingan yang mereka inginkan. Seperti perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan dengan pemerintah Desa Air Kuang. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing dalam merumuskan suatu kebijakan. Pemerintah desa yang menjadi kelompok *super-ordinate* memiliki kewenangan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima BLT-Dana Desa dan penetapan ini dilakukan sesuai dengan kepentingan dari pihak pemerintah desa, sedangkan disisi lain ada kelompok dari pihak *sub-ordinate* yang tidak setuju dan akan melakukan perlawanan hingga kepentingan yang mereka inginkan tercapai. Izza (2020:44) mengungkapkan bahwa tidak dapat disangkal antara kelompok *super-ordinasi* dan kelompok *sub-ordinasi* selalu terdapat pertentangan atau konflik. Kekuasaan menjadi salah satu pemisah yang tegas diantara dua kelompok. Mereka yang berada di posisi dominan akan mempertahankan status quo sementara yang berada pada *sub-ordinasi* akan terus melakukan perlawanan.

B. Operasionalisasi Konsep

1. Pemetaan Konflik

Konflik merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu konflik salah satunya adalah perbedaan kepentingan. Fatmaningtias (2016:6) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu akan menciptakan *in-group* atau *out-group* berdasar atas kepentingan yang sama. Perbedaan kepentingan yang mengakibatkan setiap kelompok melakukan tindakan yang koersif dalam suatu hubungan akan menciptakan suatu konflik yang terjadi di masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (2006) ada empat faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu:

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan karena setiap manusia dalam menjalani hubungan sosial tidak selalu sejalan dengan individu lain.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
- d. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dapat mengakibatkan pertentangan dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi pada perorangan atau kelompok dapat disebabkan oleh berbagai sebab dan akibat. Konflik tersebut berasal dari sumber konflik yang berbagai macam pula. Yadiman dan Amelza (2013 : 6-7) mengatakan bahwa ada empat sumber konflik, yaitu:

- a. Perbedaan Pendapat
Perbedaan pendapat dapat menjadi sumber konflik karena masing-masing pihak merasa pendapatnya paling benar dan tidak ada yang mau mengalah diantara kedua belah pihak.
- b. Salah Paham
Salah paham berarti tindakan seseorang yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik namun dianggap sebelah mata dan dianggap melakukan tindakan yang tidak baik oleh pihak lain. Salah paham dapat mengganggu hubungan antara individu yang satu dengan lain serta dapat berujung konflik.
- c. Ada Pihak Yang Dirugikan
Tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan dianggap merugikan dapat menjadi salah satu penyebab munculnya konflik. Hal ini terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihaklain tersebut.
- d. Perasaan Sensitif

- e. Perasaan sensitif dapat mengakibatkan konflik karena adanya penyalahartian oleh seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Winardi dan Mulyadi (2015:202) mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi antara perbedaan posisi yang ditempati oleh seseorang dengan posisi yang ditempati oleh orang lain dalam sebuah struktur. Jenis konflik dalam sebuah struktur yaitu konflik vertikal, yang merupakan konflik yang terjadi antar kelompok yang memiliki posisi yang tidak sama dalam sebuah struktur, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok yang berada pada posisi yang sama dalam sebuah struktur, konflik garis-staf, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok yang memegang komando dengan kelompok penasehat dalam struktur dan konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena memiliki peran lebih dari satu dan saling bertentangan.

Dalam menganalisis sebuah konflik struktural dibutuhkan sebuah pemetaan konflik yang bertujuan untuk membantu menggambarkan konflik secara grafis dan melihat hubungan-hubungan apa saja yang terlibat di dalamnya. Fisher (dalam Dermawan, 2017:8) menjelaskan bahwa pemetaan konflik merupakan suatu teknik penggambaran konflik yang dapat memahami situasi dengan lebih baik untuk melihat hubungan-hubungan diantara berbagai pihak secara jelas, untuk menjelaskan kekuasaan, untuk melihat keseimbangan antar pihak, untuk melihat para sekutu ataupun mencari sekutu yang potensial, untuk mengidentifikasi awal intervensi dan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.

Berikut ini adalah model pemetaan konflik yang dikembangkan oleh Amr Abdalla (dalam Susan, 2010:98) yang disingkat menjadi SIPABIO, yaitu:

- a. *Source* (sumber konflik), yaitu konflik yang disebabkan oleh sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe konflik yang berbeda.

- b. *Issues* (isu-isu), yaitu isu yang menunjuk pada keterkaitan tujuan yang terjadi pada pihak yang bertikai.
 - c. *Parties* (pihak), yaitu pihak yang berpartisipasi dalam konflik baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung.
 - d. *Attitudes/feelings* (sikap), yaitu perasaan dan persepsi yang mempengaruhi konflik.
 - e. *Behavior* (perilaku/tindakan), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik.
 - f. *Intervention* (campur tangan pihak lain), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat konflik untuk membantu menemukan penyelesaian.
 - g. *Outcome* (hasil), yaitu dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak yang berkonflik dalam membentuk situasi.
2. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa merupakan bantuan dana berupa uang tunai yang bersumber dari dana desa selama masa pandemi Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Penggunaan dana desa yang digunakan sebagai dana BLT dilandasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 harus segera diminimalkan terhadap perekonomian desa dan pada Pasal 2 Ayat 1 dikatakan juga perlunya pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 (Asmanto, 2020).

Dalam melaksanakan program BLT-Dana Desa, setiap desa memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan sendiri siapa saja yang berhak menerima BLT-Dana Desa. Berikut ini mekanisme pelaksanaan program BLT-Dana Desa berdasarkan Buku Saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Juni 2020 adalah:

- a. Proses Pendataan
 - 1) Perangkat desa menyiapkan data yang memuat profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 - 2) Kepala Desa memberikan tugas kepada para perangkat dan relawan desa untuk melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak menerima BLT-Dana Desa.
 - 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus bersifat ganjil.
 - 4) Melakukan pendataan ditingkat RT, RW dan dusun.
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi
 - 1) Relawan desa atau pendata desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, dan dusun.
 - 2) Relawan desa memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia dan disabilitas menjadi prioritas.
 - 3) Relawan desa mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggal.
 - 4) Bila ditemukan keluarga miskin yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), relawan desa dan petugas desa segera membuat surat keterangan domisili.
 - 5) Hasil verifikasi dan pendataan disampaikan oleh relawan desa kepada Kepala Desa.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan.
 - 1) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa dan perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
 - 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar calon penerima BLT-Dana Desa.

- 3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa.
- 4) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka pihak pemerintah desa memfasilitasi musyawarah untuk membahas keluhan tersebut.

Sementara itu, Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun yang tidak terdata dengan kriteria:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemiliki Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
- c. Mempunyai anggota keluarga yang mengalami penyakit rentan dan kronis (bappenas.go.id).

Sedangkan dalam Ringkasan Kebijakan Penggunaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai ada 7 kriteria penerima BLT-Dana Desa, yaitu:

- a. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19.
- b. Warga lanjut usia miskin dan rumah tangga yang berdampak Covid-19.
- c. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang memerlukan biaya medis.
- d. Rumah tangga terdaftar dalam penerima bantuan ditingkat desa.
- e. Rumah tangga dengan pencari nafkah pertama tidak dapat bekerja selama Pandemi Covid-19.
- f. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar rumah tangga.
- g. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasi untuk mendapatkan BLT-Dana Desa.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan seperangkat struktural yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

segala pemerintahan di Desa. Pemerintah desa memiliki tugas untuk mengatur, mengurus, mengelola serta mengendalikan sistem yang ada di Desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua Dusun, Ketua RW/RT dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa dalam undang-undang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus segala kegiatan di desa. Selain itu pemerintah desa juga menjadi wadah suara bagi masyarakat desa yang ingin menyalurkan aspirasinya kepada negara.

4. Masyarakat Non-BLT Dana Desa

Masyarakat Non-BLT Dana Desa adalah masyarakat yang tidak termasuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun yang tidak termasuk kedalam kriteria calon penerima BLT-Dana Desa. Adapun kriteria penerima BLT-Dana berdasarkan panduan pendataan BLT-Dana Desa yaitu:

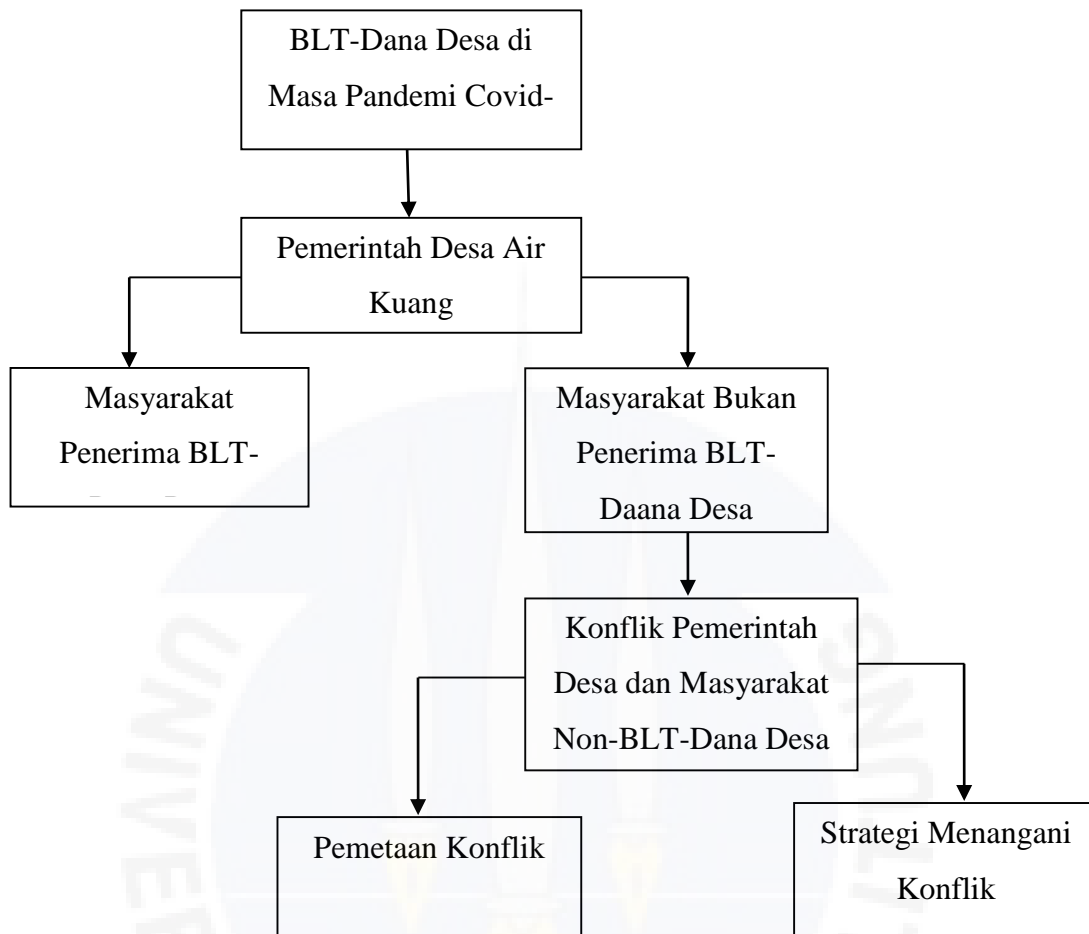
- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian, dan
- c. Mempunyai anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis.

Berdasarkan data yang bersumber dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) menjelaskan bahwa mekanisme penetapan sasaran penerima BLT-Dana Desa diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa untuk melakukan musyawarah dengan penduduk, sosialisasi, penilaian tingkat kerentanan hingga memastikan inklusivitas.

C. Alur Berpikir

Alur berpikir menjelaskan proses penelitian yang dibuat secara garis besar dengan tujuan untuk mempermudah proses penelitian. Alur berpikir juga dibuat berdasarkan pertanyaan yang mencakup sebuah tujuan dilakukannya sebuah penelitian. Berikut ini alur berpikir yang digunakan oleh peneliti:

Gambar 2.1. Alur Berpikir



Berdasarkan alur berpikir di atas, penelitian ini diawali dengan munculnya program BLT-Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Program ini muncul sebagai salah satu bentuk penanganan atau solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi di kalangan masyarakat desa dalam menghadapi pandemi Covid-19. BLT-Dana Desa merupakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa yang dibagikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa yang dianggap layak dan sesuai dengan kriteria untuk menerima BLT-Dana Desa tersebut. Pada Desa Air Kuang, BLT-Dana Desa dibagikan kepada masyarakat desa melalui pemerintah desa yang terlebih dahulu telah melakukan survey untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima BLT-Dana Desa dan masyarakat yang tidak berhak menerima BLT-Dana Desa. BLT Dana Desa

yang seharusnya menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat desa justru memunculkan konflik antara pemerintah Desa Air Kuang dengan masyarakat bukan penerima BLT-Dana Desa. Pasalnya masyarakat bukan penerima BLT-Dana Desa merasa bahwa setiap kepala keluarga berhak menerima bantuan tersebut mengingat hampir semua masyarakat turut berdampak dari adanya pandemi Covid-19. Konflik antara pemerintah Desa Air Kuang dengan masyarakat bukan penerima BLT-Dana Desa inilah yang memunculkan pemetaan konflik di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus serta strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Air Kuang untuk menangani konflik tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan perbandingan yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya untuk membandingkan perbedaan penelitian yang dilakukan serta menjadi penguatan analisis dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Shasa Rahma Sari Tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran BLT. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakterbukaan mekanisme dalam pembagian BLT. BLT yang seharusnya memiliki manfaat untuk membantu masyarakat yang kurang miskin justru menimbulkan kericuhan dan perdebatan oleh masyarakat Wonogiri. Kesalahan kriteria dan ketidaktepatan sasaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan program pembagian BLT ini menimbulkan konflik diantara masyarakat.

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam pengambilan keputusan. AHP dalam bidang pemerintahan juga digunakan

untuk dalam menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan keadaan masyarakat. AHP digunakan untuk secara rasional menangkap persepsi banyak orang yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan BLT yang terjadi di Kabupaten Wonogiri secara terukur dan tersistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis hirarki yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 6 kriteria penerima BLT, yaitu masyarakat yang mengalami penyakit kronis, usia tidak sekolah, janda kepala rumah tangga, disabilitas, tidak memiliki fasilitas listrik, tidak memiliki fasilitas BAB. Dengan persepsi masyarakat Wonogiri bahwa penduduk disabilitas dan masyarakat yang mengalami penyakit kronis harus diutamakan dalam pembagian BLT ini sedangkan pengangguran atau masyarakat yang tidak bekerja tidak diperkenankan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai di masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Brillianti tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Program Bantuan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”. Penelitian ini melihat bahwa ada 2 program bantuan unggulan yang dicanangkan pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan jaminan kesehatan. BLT mengalami permasalahan karena pembagian dana BLT kepada masyarakat yang membutuhkan dianggap tidak tepat sasaran dan ditemukan penyalahgunaan dalam penggunaan dana BLT. Hal ini yang kemudian memunculkan peluang korupsi, potensi konflik serta memunculkan anggapan bahwa BLT merupakan disensitif bagi tenaga kerja.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah program bantuan pemerintah memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. BLT dan jaminan kesehatan dianggap memiliki dampak negatif di kalangan masyarakat. BLT ini dianggap memiliki keterjangkauan masyarakat yang sempit mengakibatkan ketidakmerataan pembagian BLT di masyarakat.

Hal inilah yang kemudian dianggap mampu memicu peluang korupsi dan potensi konflik di masyarakat itu sendiri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Darwan, Jurusan pengembangan masyarakat Islam Tahun 2018 dengan judul “Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyur, Keruak, Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian yang dilakukan oleh Darwan ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program BLT yang dianggap tidak tepat sasaran. Disisi lain pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat dan cepat hingga konflik dan kericuhan tidak dapat terelakkan. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk menganalisis faktor penghambat implementasi BLT dengan tujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT agar program ini dapat berjalan secara efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi program BLT di Desa Senyur belum maksimal dilihat dari segi pendataan rumah tangga yang masih banyak ditemukan tidak layak untuk menerima program BLT. Selain itu pendataan yang dilakukan oleh BPS menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penentuan kriteria para penerima BLT. Adapun faktor-faktor penghambat program BLT yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pendataan penerima BLT, verifikasi data, tidak konsistennya dalam penentuan penerima BLT dan sikap pelaksanaan BLT.

Berikut ini disajikan ringkasan dari ketiga penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian	Kesimpulan
1.	Shasa Rahma Sari	2018	Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri	<i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan BLT yang terjadi di Kabupaten Wonogiri secara terukur dan tersistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis hirarki yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.	Pembagian BLT diutamakan kepada masyarakat yang menyandang disabilitas dan mengalami penyakit kronis.
2.	Fikri Brillianti	2020	Pengaruh Program Bantuan Pemerintah terhadap Kesejahteraan	Penelitian ini melihat bahwa BLT mengalami permasalahan karena pembagian dana BLT kepada masyarakat yang membutuhkan dianggap tidak tepat sasaran dan ditemukan penyalahgunaan dalam penggunaan dana BLT. Adapun metode	BLT dianggap belum berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan

			Masyarakat Indonesia	dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	masyarakat Indonesia.
3.	Darwan	2018	Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyur, Keruak, Kabupaten Lombok Timur.	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program BLT yang dianggap tidak tepat sasaran. Disisi lain pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat dan cepat hingga konflik dan kericuhan tidak dapat terelakkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Implementasi program BLT belum maksimal dan ditemukannya penerima BLT yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, kajian terkait konflik permasalahan dalam pembagian BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Air Kuang belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Konflik Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Bukan Penerima BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Air Kuang”.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang ditelusuri penulis, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 2.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Shasa Rahma Sari	2018	Analisis Program Bantuan Langsung Tunai dengan Metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri	Sama-sama menganalisis program Bantuan Langsung Tunai	Metode Penelitian, Fokus kajian, dan Lokasi penelitian
2.	Fikri Brillianti	2020	Pengaruh Program Bantuan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia	Sama-sama meneliti tentang program pemerintah dan Metode penelitian	Fokus Kajian dan Lokasi Penelitian

3.	Darwan	2018	Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyur, Keruak, Kabupaten Lombok Timur	Sama-sama membahas tentang program BLT dan Metode Penelitian	Fokus Kajian dan Lokasi Penelitian
----	--------	------	--	--	------------------------------------

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki latar belakang dan aspek kajian yang sama yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang permasalahan BLT. Selain itu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri Brillianti dan Darwan memiliki metode penelitian yang sama dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Sementara itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada fokus kajian yang dibahas. Pertama, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shasa Rahma Sari membahas mengenai analisis hirarki dalam pelaksanaan program BLT. Peneliti kedua yaitu Fikri Brillianti membahas mengenai pengaruh program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat dan yang ketiga yaitu Darwan membahas tentang implementasi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT sedangkan peneliti menganalisis mengenai konflik yang disebabkan oleh BLT-Dana Desa. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan oleh setiap peneliti juga berbeda dimana Shasa Rahma Sari melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri, Fikri Brillianti di Indonesia, Darwan di Kabupaten Lombok Timur sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.